

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas Program Semua Ikut Bergerak Bersama Menangani Stunting (Si Bening) di Kecamatan Semarang Utara, dengan menggunakan indikator efektivitas organisasi menurut Duncan dan Steers yang meliputi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, dari aspek pencapaian tujuan, Program Si Bening telah memberikan kontribusi nyata dalam upaya penanganan stunting melalui pelaksanaan intervensi gizi, pendampingan keluarga, serta edukasi kesehatan. Manfaat program dirasakan oleh masyarakat, khususnya keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Namun demikian, tujuan utama berupa penurunan angka stunting secara konsisten dan berkelanjutan belum tercapai secara optimal, ditandai dengan kondisi angka stunting yang masih fluktuatif dan munculnya kasus baru. Faktor sosial, ekonomi, dan perilaku keluarga menjadi penyebab utama belum optimalnya pencapaian tujuan program.

Kedua, dari aspek integrasi, Program Si Bening menunjukkan tingkat efektivitas yang relatif baik. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor antara kecamatan, puskesmas, PKK, kelurahan, dan kader posyandu berjalan secara rutin dan terstruktur. Integrasi ini menjadi kekuatan utama program dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan. Namun, integrasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh partisipasi masyarakat yang

merata, terutama dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi, sehingga dampak program terhadap perubahan perilaku masih terbatas.

Ketiga, dari aspek adaptasi, Program Si Bening menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam menyesuaikan diri dengan kondisi sosial ekonomi dan karakteristik wilayah Kecamatan Semarang Utara. Penyesuaian sasaran penerima manfaat, pengelompokan kegiatan edukasi, serta pengembangan inovasi lokal seperti Semut Kebal, Rumah Pelita, Si Genting, dan Semut Gemati merupakan bentuk adaptasi program terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, kemampuan adaptasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin perubahan perilaku keluarga secara berkelanjutan dan keberlangsungan program di seluruh kelurahan, terutama pada wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber daya dan pendanaan.

Berdasarkan sintesis terhadap ketiga indikator efektivitas organisasi (Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi), penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Si Bening di Kecamatan Semarang Utara Belum Efektif.

Ketidakefektifan ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan fokus kebijakan. Program Si Bening sejauh ini masih menitikberatkan pada Intervensi Spesifik sektor kesehatan, seperti pemberian makanan tambahan dan pemantauan gizi. Padahal, secara teoritis dan empiris, keberhasilan penanganan stunting justru lebih didominasi oleh pengaruh Intervensi Sensitif sektor non-kesehatan, yang meliputi kualitas sanitasi lingkungan, ketersediaan infrastruktur dasar air bersih) serta ketahanan ekonomi keluarga.

Penelitian ini menemukan bahwa intervensi pemerintah pada aspek sensitif tersebut belum berjalan optimal di Kecamatan Semarang Utara. Masalah struktural seperti lingkungan pesisir yang rentan dan kemiskinan perkotaan menjadi determinan utama yang belum tersentuh secara tuntas oleh program ini. Akibatnya, intervensi kesehatan yang diberikan menjadi kurang berdampak karena balita kembali pada kondisi lingkungan dan ekonomi yang tidak mendukung tumbuh kembang. Dengan demikian, karena tujuan utama organisasi untuk menurunkan angka stunting secara stabil tidak tercapai akibat belum tuntasnya penanganan pada akar masalah struktural tersebut, maka program dinyatakan belum efektif.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, diketahui bahwa meskipun Program Semua Ikut Bergerak Bersama Menangani Stunting (Si Bening) di Kecamatan Semarang Utara telah berjalan dan menunjukkan berbagai upaya positif, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kekurangan yang berdampak pada belum optimalnya penurunan stunting secara berkelanjutan. Kekurangan tersebut terutama berkaitan dengan konsistensi pelaksanaan program, keterlibatan masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta keberlanjutan kegiatan di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, saran berikut disusun untuk menyoroti dan menindaklanjuti kekurangan pelaksanaan program agar efektivitas Program Si Bening dapat ditingkatkan ke depan.

1. Bagi Pemerintah Kecamatan Semarang Utara : Bagi Pemerintah Kota Semarang dan Kecamatan Semarang Utara Mengingat kompleksitas masalah stunting yang bersifat multidimensi, pemerintah perlu memperkuat peran tata kelola melalui langkah-langkah berikut:

- a) Penguatan Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan: Pemerintah Kecamatan perlu mendorong prioritas pembangunan fisik yang berorientasi kesehatan. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Perkim harus diintensifkan untuk menuntaskan masalah sanitasi dan akses air bersih di wilayah tinggi stunting seperti Bandarharjo dan Tanjung Mas. Dalam perspektif pemerintahan, perbaikan lingkungan hunian harus ditempatkan sebagai prasyarat mutlak keberhasilan program kesehatan.
- b) Integrasi Skema Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi: Pemerintah perlu menyelaraskan data keluarga sasaran stunting dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Solusi bagi keluarga stunting tidak cukup hanya bantuan konsumtif (makanan), melainkan harus disertai intervensi pemberdayaan ekonomi (pelatihan kerja/bantuan UMKM). Hal ini bertujuan untuk memutus rantai ketergantungan warga terhadap bantuan pemerintah dan menciptakan kemandirian ekonomi keluarga pasca-program.
- c) Formalisasi Kemitraan Strategis (*Collaborative Governance*): Untuk mengatasi ketimpangan sumber daya antar-kelurahan (seperti kasus di Bulu Lor),

pemerintah perlu menyusun regulasi atau nota kesepahaman (MoU) yang lebih mengikat dengan sektor swasta (CSR) di kawasan pelabuhan dan industri. Kemitraan tidak boleh lagi bersifat sukarela atau insidental, melainkan harus terlembaga agar distribusi sumber daya dapat diarahkan secara merata ke wilayah yang memiliki kapasitas fiskal rendah.

- d) Transformasi Komunikasi Publik: Pemerintah perlu mengubah pendekatan sosialisasi dari model satu arah menjadi pendekatan partisipatif. Mengingat rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum formal, strategi komunikasi harus melibatkan tokoh informal (tokoh masyarakat/agama) untuk membangun kesadaran kolektif bahwa pencegahan stunting adalah tanggung jawab sosial bersama, bukan hanya tugas pemerintah.

- 2. Bagi Puskesmas : Meskipun puskesmas telah berperan aktif dalam pelaksanaan intervensi gizi dan pendampingan balita stunting, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku keluarga belum berlangsung secara konsisten setelah pendampingan berakhir. Oleh karena itu, puskesmas perlu memperkuat pendekatan pendampingan jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada pemberian PMT, tetapi juga pada penguatan edukasi berbasis keluarga dan pemantauan pasca-intervensi. Penguatan kunjungan rumah dan edukasi berulang perlu dilakukan untuk mengatasi kekurangan dalam keberlanjutan hasil pendampingan

3. Bagi PKK dan Kader Posyandu : Penelitian ini menemukan bahwa peran PKK dan kader posyandu sangat strategis, namun masih menghadapi keterbatasan dalam hal kapasitas dan dukungan operasional. Kekurangan berupa terbatasnya jumlah kader, insentif yang belum memadai, serta pelatihan yang belum berkelanjutan berpotensi menghambat efektivitas pendampingan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kader melalui pelatihan rutin, pemberian insentif yang layak, serta dukungan sarana pendukung agar peran kader dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
4. Bagi Masyarakat : Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih cenderung selektif, di mana kehadiran lebih tinggi pada kegiatan yang bersifat bantuan dibandingkan kegiatan edukasi dan sosialisasi. Kondisi ini menjadi salah satu kekurangan utama dalam efektivitas program. Oleh karena itu, masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan kesadaran bahwa keberhasilan penanganan stunting tidak hanya bergantung pada bantuan jangka pendek, tetapi juga pada perubahan pola asuh dan pemenuhan gizi anak secara berkelanjutan. Peran aktif keluarga menjadi kunci agar hasil program tidak bersifat sementara.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya : Kekurangan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan keterpaduan data dan kebijakan lintas sektor dalam penanganan stunting. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut keterkaitan antara kebijakan kesehatan dengan kebijakan di sektor lain, seperti kesejahteraan sosial, ekonomi keluarga, perumahan, dan

lingkungan hidup. Pendekatan lintas sektor tersebut penting mengingat stunting merupakan permasalahan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi kesehatan semata.